

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Laba

Laba merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Laba merupakan komponen utama dalam penyusunan laporan keuangan. Kualitas laba merupakan laba yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap kinerja saat ini dan dapat digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kinerja masa depan. Selain itu, kualitas laba adalah laba yang disajikan berdasarkan neraca saldo yang memungkinkan penilaian yang akurat terhadap risiko utama, seperti likuiditas, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas. Dengan demikian, kualitas laba dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan karena dapat mencerminkan penilaian yang akurat yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan [15].

Kualitas laba dapat diukur dengan *Earning Response Coefficient* (ERC). *Earnings Response Coefficient* adalah kepekaan *return* saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan [16]. Laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut [17]:

1. Mampu mencerminkan kinerja operasional perusahaan saat ini dengan akurat;
2. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja operasional perusahaan di masa depan;
3. Mampu dijadikan sebagai ukuran yang baik dalam menilai perusahaan.

Pihak manajemen perusahaan selalu merencanakan besaran perolehan laba setiap periodenya, dengan menentukan target yang harus dicapai. Penentuan target ini sangat penting guna mencapai tujuan perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Prediksi laba dapat dilakukan karena angka laba yang mengandung informasi. Pasar telah mempunyai harapan mengenai besaran laba suatu perusahaan atas informasi yang tersedia secara publik. Hal ini yang menyebabkan akan adanya reaksi dari pasar saat laba diumumkan. Selisih antara laba yang diharapkan dan laba dalam laporan disebut dengan laba kejutan (*unexpected earnings*) [16].

$$LK_{j,t} = \frac{E_{t1} - E_{t0}}{E_{t0}} \quad (2.1)$$

$LK_{j,t}$ = Laba kejutan (*unexpected earnings*) perusahaan j pada periode t

E_{t1} = *Earnings* perusahaan j pada periode t

E_{t0} = *Earnings* perusahaan j pada periode t0

Labanya kejutan mempresentasi informasi yang belum tertangkap oleh pasar sehingga pasar akan bereaksi pada saat pengumuman. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham (*return* saham) perusahaan tertentu yang cukup mencolok pada saat pengumuman laba. Yang dimaksud dengan mencolok adalah terdapat perbedaan yang cukup besar *return* yang terjadi (*actual return*) dengan *return* harapan (*expected return*). Dengan kata lain, terjadi *return* kejutan atau abnormal (*unexpected* atau *abnormal return*) pada saat pengumuman laba [16]. Return umumnya dinyatakan dalam persen perubahan return perusahaan j pada periode t dapat dinyatakan sebagai berikut [16]:

$$R_{j,t} = \frac{P_{t1} - P_{t0}}{P_{t0}} \quad (2.2)$$

$R_{j,t}$ = *Return* saham perusahaan j pada hari t

P_{t1} = Harga penutupan saham j pada hari t

P_{t0} = Harga penutupan saham j pada hari t0

Untuk mengetahui adanya *return* abnormal, harus ditentukan suatu pembandingan yang dianggap sebagai *return* normal atau *return* harapan (*expected return*). *Return* normal dapat diperoleh dengan menggunakan data pasar atau disebut *return* pasar (R_m). *Return* pasar (R_m) adalah rata-rata berbobot nilai (*value-weighted average*) seluruh *return* saham perusahaan yang tercatat di bursa saham pada saat tertentu dapat dinyatakan sebagai berikut [16]:

$$R_{m,t} = \frac{IHSG_{t1} - IHSG_{t0}}{IHSG_{t0}} \quad (2.3)$$

$R_{m,t}$ = *Return* pasar j pada hari ke -t

$IHSG_{t1}$ = Indeks harga saham gabungan pada hari t

$IHSG_{t0}$ = Indeks harga saham gabungan pada hari t0

Model terakhir disebut dengan *return-sesuaian-pasar* (*market-adjusted returns*). Dengan pembandingan tersebut, *return abnormal* (RA) perusahaan j pada waktu t ditentukan sebagai berikut [16] :

$$\text{Market-adjusted returns : } RA_{j,t} = R_{j,t} - R_{m,t} \quad (2.4)$$

$RA_{j,t}$ = *Return Abnormal* perusahaan j pada periode t

$R_{j,t}$ = *Return Actual* perusahaan j pada periode t

$R_{m,t}$ = *Return pasar* pada periode t

Karena reaksi pasar tidak selalu terjadi seketika pada hari pengumuman reaksi dapat diukur untuk periode beberapa hari sebelum dan sesudah peristiwa (disebut jendela peristiwa atau *event window*). Dengan jendela peristiwa yang lebar perbedaan kecepatan reaksi antarpelaku pasar dapat diakomodasi. Reaksi pasar kemudian diukur dengan apa yang disebut *return abnormal kumulatif*/RAK (*cumulative abnormal return*/CAR). RAK untuk jendela peristiwa antara t_1 dan t_2 dapat dinyatakan sebagai berikut [16]:

$$RAK_{j,(t_1,t_2)} = \sum_{t=t_1}^{t_2} RA_{j,t} \quad (2.5)$$

$RAK_{j,t}$ = *Return Abnormal Kumulatif* perusahaan j pada waktu t

$RA_{j,t}$ = *Return Abnormal* perusahaan j pada hari t

Penelitian ini menggunakan studi koefisien respon laba (*earnings response coefficient* atau ERC), dengan model pengujian berikut [16] :

$$RAK_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 LK_{j,t} + \varepsilon_{j,t} \quad (2.6)$$

$RAK_{j,t}$ = *Return Abnormal Kumulatif* perusahaan j pada waktu t

β_1 = *Earnings Response Coefficient*

$LK_{j,t}$ = Laba kejutan perusahaan j pada periode t

$\varepsilon_{j,t}$ = Error

Kualitas laba yang diprosikan dengan *earnings response coefficient* (ERC) menunjukkan seberapa besar informasi laba suatu perusahaan dapat menarik respon pasar. Semakin tinggi *earnings response coefficient* maka laba dianggap lebih berkualitas dan akan meningkatkan respon pasar. Sehingga kualitas laba dapat dijadikan sebagai faktor untuk peningkatan kinerja perusahaan.

2.1.2. Alokasi Pajak Antar Periode

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperbolehkan menghitung penghasilan neto [18]. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan [19].

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun menyusun laporan keuangan. Besarnya pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan laba (rugi) fiskal. Untuk itu, laba (rugi) komersial perlu dikonversi menjadi laba (rugi) fiskal. Hal ini dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara laba (rugi) menurut aturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut juga *book tax differences*. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah faktor yang dapat membuat laba yang lebih kecil atau sebaliknya yang dapat dibedakan menjadi [20]:

a. Perbedaan sementara (temporer) /beda waktu

Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Perbedaan temporer berakibat harus diakuiinya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi: Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda.

- 1) *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi.
- 2) Perbedaan nilai tercatat dengan tax base dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal.

3) Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak [20].

b. Perbedaan tetap (permanen) / beda tetap

Perbedaan tetap timbul akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal. Akibat dari adanya perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Adanya pendapatan atau beban yang dapat diakui oleh komersial namun tidak dapat diakui oleh fiskal diatur dalam SAK sebagai perbedaan tetap [20].

Pendirian yang berlaku umum bagi akuntansi bahwa beban pajak penghasilan merupakan biaya yang seharusnya disandingkan dengan penghasilan. Proses yang mengkaitkan antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan yang bersangkutan dikenal sebagai alokasi pajak (*tax allocation*) [21]. Perbedaan waktu/ sementara membutuhkan alokasi pajak antar periode (*interperiod tax allocation*) karena adanya *counterbalance* pada akhir suatu periode, sedangkan perbedaan permanen tidak perlu. Alokasi pajak antar periode adalah perbedaan temporer yang merupakan dampak dari perbedaan kebijakan pelaporan keuangan fiskal dan pelaporan keuangan komersial [22]. Alokasi pajak antar periode berdasarkan PSAK No. 46 mengharuskan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam neraca. Pengakuan pajak penghasilan dalam PSAK No. 46 menetapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif dengan pendekatan aktiva-kewajiban atau *asset-liability approach* [23].

Alokasi pajak penghasilan antar periode (*Interperiod income tax allocation*) adalah alokasi beban pajak penghasilan ke berbagai periode akuntansi. Metode alokasi pajak antar periode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu [21] :

1. *Defferal method* (metode pajak tangguhan)
2. *Liability method* (metode kewajiban)
3. *Net-of-tax method* (metode pajak neto)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya *deferral method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial. Selain dari itu, keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah [21]:

1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedang di lain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
2. Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi yang berkenaan dengan waktu pemulihan Penghasilan Kena Pajak kini maupun pada periode pemulihan tarif pajak.
3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban mengungkapkan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba rugi perusahaan dan tidak tergabung dalam nilai individu aset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya pada metode pajak neto.
4. Kelemahan yang serius dari metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang memperlakukan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan malahan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas aset perusahaan. Para direksi lebih fokus pada masalah laporan laba-rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

Metode akuntansi PPh tanpa alokasi pajak antar periode merupakan metode akuntansi yang mengakibatkan laba bersih tidak dapat merefleksikan laba yang sebenarnya, karena beban PPh yang dilaporkan tidak berkorelasi langsung (tidak match) dengan laba sebelum pajak. Aktiva dan kewajiban dalam neraca juga

dinyatakan terlalu rendah (*understated*) sebagai akibat tidak dilaporkannya konsekuensi pajak di masa mendatang atas perbedaan temporer pengakuan pendapatan dan beban. [23]

Alokasi pajak antar periode dapat diukur dengan melihat besaran penghasilan dan beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laba rugi dibagi dengan jumlah laba akuntansi sebelum pajak. Alokasi pajak antar periode dihitung dengan rumus [22] :

$$ALPA 1_{it} = \frac{BPT_{it}}{LSP_{it}} \quad \text{Atau} \quad (2.7)$$

$$ALPA 2_{it} = \frac{PPT_{it}}{LSP_{it}} \quad (2.8)$$

Keterangan :

$ALPA 1_{it}$ = alokasi pajak antar periode untuk perusahaan i yang melaporkan beban pajak tangguhan untuk tahun t

$ALPA 2_{it}$ = alokasi pajak antar periode untuk perusahaan i yang melaporkan beban pajak tangguhan untuk tahun t

BPT_{it} = beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

PPT_{it} = penghasilan pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

LSP_{it} = laba (rugi) sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

Semakin tinggi alokasi pajak maka semakin tinggi pula perbandingan beban/pajak penghasilan tangguhan suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan investor akan lebih curiga terhadap laporan perusahaan tersebut. Akibatnya investor tidak memberikan niat atau respon yang tinggi terhadap perusahaan yang berefek pada penurunan kualitas laba perusahaan.

2.1.3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan dan laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan (*operating asset*). Profitabilitas juga merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh

keuntungan yang berhubungan dengan total aktiva (*total assets*), penjualan (*sales*), dan modal sendiri [24].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [25] :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk [25] :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Pada penelitian ini, rasio profitabilitas diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). ROA dapat digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan [24].

Rasio *Return on Assets* (ROA) mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset. ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Keunggulan *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut [26]:

1. Perhatian manajemen dititik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal yang diinvestasikan.
2. ROA dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya. Selanjutnya

dengan ROA akan menyajikan perbandingan berbagai macam prestasi antar divisi secara obyektif. ROA akan mendorong divisi untuk menggunakan dalam memperoleh aktiva yang diperkirakan dapat meningkatkan ROA tersebut.

3. Analisa ROA dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.
4. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
5. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *Return On Asset* (ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan.
6. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Asset* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Kelemahan *Return On Asset* (ROA) adalah [27] :

1. *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.
3. *Return On Asset* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
4. *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset, dan sebaliknya.

Return on Assets (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut [28] :

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets} \quad (2.9)$$

Informasi tentang profitabilitas suatu perusahaan sangat penting bagi investor untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan yang akan dia tanamkan modalnya dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dalam menghasilkan keuntungan, dan sebaliknya. Investor lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi karena potensi pembagian dividen lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki ROA yang rendah. Semakin tinggi ROA, maka respon pasar juga semakin meningkat.

2.1.4. Likuiditas

Pendanaan bagi perusahaan dapat datang dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber pendanaan eksternal adalah hutang. Dalam prakteknya, banyak sekali perusahaan yang memiliki kendala finansial sehingga tidak dapat mendanai kegiatan operasional maupun melunasi hutangnya. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan jangka pendek yang kuat apabila [29]:

1. mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya,
2. mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjai operasi perusahaan yang normal,
3. mampu membayar bunga utang jangka pendek dan dividen, dan
4. mampu memelihara kredit rating yang menguntungkan.

Di sisi lain, tidak jarang pula dijumpai perusahaan yang justru memiliki kelebihan kas secara berlimpah dan tidak terpakai (*idle cash*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini juga tidak baik karena berarti bahwa manajemen dianggap tidak mampu mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekspansi bisnis dan investasi, baik investasi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang [30].

Kekurangan ataupun kelebihan kas tersebut sesungguhnya dapat diatasi jika manajemen perusahaan senantiasa melakukan analisis rasio keuangan secara berkala sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan manajemen perusahaan untuk secara efektif menetapkan

langkah-langkah perbaikan, efisiensi, ataupun antisipasi terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan perusahaan, termasuk memanfaatkan kelebihan kas yang ada untuk kepentingan dan tujuan strategi perusahaan. Analisis keuangan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio likuiditas [30].

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menilai perusahaan terkait dengan kemampuannya untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya adalah rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat dari hasil rasio likuiditas yaitu [24]:

1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal aktiva lancar dikurangi persediaan dan hutang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah
4. Mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang.
7. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Rasio likuiditas atau *liquidity ratio* atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuid

suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar (utang jangka pendek). Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo. Atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban/utang pada saat ditagih [31].

Pada penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. *Current Ratio* dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) [31].

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis *Current Ratio* adalah sebagai berikut [32] :

1. Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancar.
2. Syarat yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam menjual barangnya.
3. *Present value* (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.
4. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar, kalau nilai persediaan semakin turun (deflasi) maka aktiva lancar yang besar (terutama ditunjukkan dalam persediaan) maka tidak menjamin likuiditas perusahaan.
5. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya kelebihan investasi dalam persediaan.
6. Kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang, makin besar kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang maka dibutuhkan adanya rasio yang besar pula.
7. Tipe atau jenis perusahaan (perusahaan yang memproduksi sendiri barang yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa).

Tingkat likuiditas suatu perusahaan yang diukur dengan *current ratio* dapat dipertinggi dengan cara [33]:

1. Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar.
2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar.
3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

Dalam prakteknya, standar rasio lancar yang baik adalah 200% atau 2 : 1. Besaran ini kerap dianggap sebagai ukuran yang baik untuk tingkat likuiditas suatu perusahaan. Artinya, dengan hasil perhitungan rasio sebesar itu, perusahaan sudah dapat dikatakan berada dalam posisi aman untuk jangka pendek. Namun apabila angka rasio terlalu tinggi maka hal itu berarti terdapat banyak dana yang tertanam pada modal kerja yang tidak menghasilkan keuntungan. *Current Ratio* (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut [31]:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \quad (2.10)$$

Rasio likuiditas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancarnya. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki resiko yang cenderung lebih kecil karena perusahaan mampu melunasi utang lancarnya. Namun perusahaan dengan likuiditas yang terlalu tinggi dianggap tidak memiliki kemampuan dalam mengelola asetnya dengan baik. Sehingga ketika laba diumumkan, laba akan mendapat respon yang kurang baik dari pasar.

2.1.5. *Leverage*

Leverage merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dengan kata lain, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset [24]. Keuntungan dengan mengetahui *leverage ratio* adalah [31]:

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.

3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

Leverage ratio (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Salah satu ukuran *leverage* keuangan perusahaan adalah rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan kata lain, rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang dan biasanya rasio ini dinyatakan dalam persentase. Bagi bank, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi, tetapi bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik [31].

Variabel-variabel pembentuk *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut [27]:

1. Utang

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam utang lancar (utang jangka pendek) dan utang jangka panjang.

- a. Utang lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar meliputi antara lain :
 - 1) Utang dagang
 - 2) Utang wesel
 - 3) Utang pajak
 - 4) Biaya yang masih harus dibayar
 - 5) Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo
 - 6) Penghasilan yang diterima di muka
- b. Utang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Utang jangka panjang meliputi :

- 1) Utang obligasi
 - 2) Utang hipotik
 - 3) Pinjaman jangka panjang yang lain.
2. Modal

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi DER adalah sebagai berikut [34]:

1. Kenaikan atau penurunan hutang
2. Kenaikan atau penurunan modal sendiri
3. Hutang atau modal sendiri tetap
4. Hutang meningkat lebih tinggi dibandingkan modal sendiri, atau sebaliknya.

Pada penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus [31]:

$$DER = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Equity}} \quad (2.11)$$

Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin besar nilai DER, maka semakin besar kewajiban hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Investor cenderung menghindari perusahaan yang memiliki DER yang tinggi karena laba akan lebih cenderung digunakan perusahaan untuk membayar hutang dibandingkan membayar dividen kepada investor. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai DER, maka semakin rendah respon pasar.

2.1.6. Komite Audit

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, antara lain meliputi [35]:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat tersebut.

Komite audit sebagaimana didefinisikan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan [36].

Syarat-syarat menjadi anggota komite audit, yaitu [36]:

1. Komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris.
2. Terdiri dari minimal seorang komisaris independen dan minimal dua orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mamapu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntansi yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.
7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan ke pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.
12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Komite audit dapat dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat di dalam suatu perusahaan [36].

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.11)$$

Komite audit merupakan komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk menilai kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan informasi laporan keuangan. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, diharapkan dapat mengendalikan manajemen agar dapat menyajikan informasi laba yang berkualitas.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva [33]. Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan

menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, *log size*, nilai pasar saham, dan sebagainya [37]. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [38].

Definisi dan karakteristik dari berbagai usaha dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 sebagai berikut [39]:

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

4. Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha ini meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan bersih usaha ini melebihi usaha menengah yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan melebihi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dari segi jumlah, sekitar 80% usaha dioperasikan dalam bentuk kepemilikan perseorangan, sedangkan sisanya terbagi rata antara persekutuan dan perseroan terbatas. Akan tetapi dilihat dari nilai penjualan dalam dolar, sekitar 80% dari seluruh usaha dilakukan oleh perseroan terbatas, sekitar 13% oleh kepemilikan perseorangan, dan sekitar 7% oleh persekutuan. Karena perseroan terbatas melakukan usaha yang paling besar dan karena kepemilikan perseorangan serta persekutuan yang paling berhasil pada akhirnya akan berubah menjadi perseroan terbatas, kita akan berkonsentrasi pada bentuk usaha itu [40].

Ukuran besar kecilnya perusahaan dapat diukur melalui logaritma natural dari total aktiva [41]. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan logaritma natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya [42]. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut [42]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset}) \quad (2.12)$$

Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan besar karena perusahaan besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin tinggi respon pasar yang mengakibatkan semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa review dari penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Antadar Nonitehe Laoli dan Vinola Herawaty (2019)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Growth*, *Leverage*, *Operating Cycle* dan *Prudence* terhadap Kualitas Laba Dengan *Firm Size* Sebagai Variabel Moderasi”. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 58 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, profitabilitas, *growth*, *leverage*, *operating cycle* dan *prudence* berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, variabel profitabilitas, *leverage* dan *firm size* berpengaruh negatif terhadap kualitas laba sedangkan *growth*, *operating cycle* dan *prudence* tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Variabel moderasi *firm size* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap kualitas laba sedangkan *growth*, *operating cycle* dan *prudence* tidak mampu dimoderasi oleh *firm size* [7].

2. Elyzabet Indrawati Marpaung (2019)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laba”. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, *leverage* dan likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* dan likuiditas terhadap kualitas laba [9].

3. Gahani Purnama Wati dan I Wayan Putra (2017)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Corporate Governance* Pada Kualitas Laba”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh pada kualitas laba [10].

4. Ni Wayan Widmasari, I Putu Edy Arizona, dan Luh Komang Merawati (2019)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Investment Opportunity Set*, Komite Audit, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, *Investment Opportunity Set*, komite audit, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, *Investment Opportunity Set* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas laba [12].

5. Reza Ardianti (2018)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode, Persistensi Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012 - 2016)”. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, alokasi pajak antar periode, persistensi laba, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, alokasi pajak antar periode berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, sedangkan persistensi laba, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba [6].

6. Suriani Ginting (2017)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 58 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba [8].

7. Tri Bawoni dan Muhammad Jafar Shodiq (2020)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Alokasi Pajak Antar Periode dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba”. Populasi pada penelitian ini

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Dari hasil pemilihan diperoleh sampel sebanyak 62 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, likuiditas, alokasi pajak antar periode, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, likuiditas, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba sedangkan alokasi pajak antar periode berpengaruh negatif terhadap kualitas laba [5].

8. Tulus Suryanto (2016)

Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Accounting Disclosure*, *Accounting Harmonization* dan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Dari hasil pemilihan sampel diperoleh sampel sebanyak 48 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *accounting disclosure*, *accounting harmonization*, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara parsial, pengungkapan akuntansi (*accounting disclosure*) tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan akuntansi harmonisasi (*accounting harmonization*) dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba [11].

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Antadar Nonitehe Laoli dan Vinola Herawaty (2019) [7]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Growth</i> , <i>Leverage</i> , <i>Operating Cycle</i> dan <i>Prudence</i> terhadap Kualitas Laba Dengan <i>Firm Size</i> Sebagai Variabel Moderasi.	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Laba <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Growth</i> , c. <i>Leverage</i> d. <i>Operating Cycle</i> e. <i>Prudence</i> <u>Variabel Moderasi :</u> <i>Firm Size</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>growth</i> , <i>leverage</i> , <i>operating cycle</i> dan <i>prudence</i> berpengaruh terhadap kualitas laba. <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>firm size</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas laba b. <i>Growth</i> , <i>operating cycle</i> dan <i>prudence</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. c. Variabel moderasi <i>firm size</i> mampu memoderasi pengaruh negatif profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap kualitas laba sedangkan <i>growth</i> , <i>operating cycle</i> dan <i>prudence</i> tidak

Lanjutan Tabel 2.1

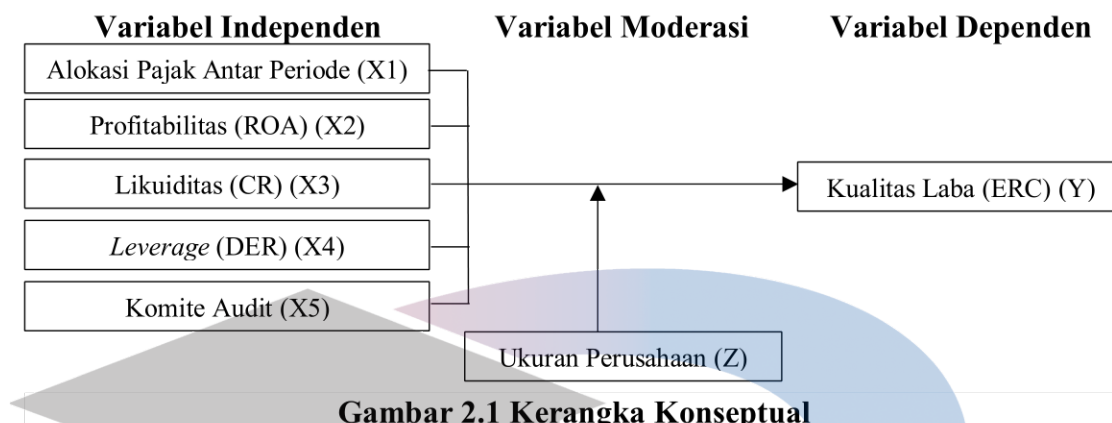
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Elyzabet Indrawati Marpaung (2019) [9]	Pengaruh Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Terhadap Laba	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Terhadap Kualitas Laba	mampu dimoderasi oleh <i>firm size</i> . <u>Secara Simultan:</u> <i>Leverage</i> dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> dan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. b. Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kualitas laba.
Gahani Purnama Wati dan I Wayan Putra (2017) [10]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> Pada Kualitas Laba	<i>Leverage Corporate</i> Pada Kualitas Laba	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laba. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laba. b. Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
Ni Wayan Widmasari, I Putu Edy Arizona, dan Luh Komang Merawati (2019) [12]	Pengaruh <i>Investment Opportunity Set</i> , Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba	<i>Investment Opportunity Set</i> , Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba	<u>Secara Simultan:</u> <i>Investment Opportunity Set</i> , komite audit, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Investment opportunity set</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba b. Komite audit dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba
Reza Ardianti (2018) [6]	Pengaruh Pajak Antar Periode, Persistensi Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba (Studi	Alokasi Periode, Laba, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba (Studi	<u>Secara Simultan:</u> Alokasi pajak antar periode, persistensi laba, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba.

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
	Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012 - 2016)	b. Persistensi Laba c. Profitabilitas d. Likuiditas	<u>Secara Parsial:</u> a. Alokasi Pajak berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. b. Persistensi laba, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba.
Suriani Ginting (2017) [8]	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Laba <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Likuiditas c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba <u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
Tri Bawoni dan Muhammad Jafar Shodiq (2020) [5]	Pengaruh Likuiditas, Alokasi Pajak Antar Periode dan Komite Audit terhadap Kualitas Laba	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Laba <u>Variabel Independen:</u> a. Likuiditas b. Alokasi Pajak Antar Periode c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas, Alokasi pajak antar periode dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. <u>Secara Parsial:</u> a. Likuiditas, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. b. Alokasi pajak antar periode mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laba.
Tulus Suryanto (2016) [11]	Pengaruh <i>Accounting Disclosure, Accounting Harmonization</i> , dan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Laba <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Accounting Disclosure</i> b. <i>Accounting Harmonization</i> c. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> <i>Accounting disclosure, accounting harmonization</i> , dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. <u>Secara Parsial:</u> a. Pengungkapan akuntansi (<i>accounting disclosure</i>) tidak berpengaruh terhadap kualitas laba b. Akuntansi harmonisasi (<i>accounting harmonization</i>) dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Alokasi pajak antar periode sangat diperlukan karena adanya perbedaan jumlah laba kena pajak dengan jumlah laba akuntansi, serta tarif pajak yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu agar diperoleh perlakuan yang konsisten. Beban atau pajak penghasilan tangguhan mengandung akrual yang tinggi sehingga laba yang tercantum bukan merupakan laba yang sebenarnya. Semakin tinggi alokasi pajak antar periode maka semakin tinggi pula beban atau pajak penghasilan tangguhan suatu perusahaan. Hal ini akan menyebabkan investor curiga terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Akibatnya investor tidak memberikan respon yang tinggi terhadap perusahaan yang berefek pada penurunan kualitas laba perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa alokasi pajak berpengaruh terhadap kualitas laba [5].

Perusahaan yang memiliki alokasi pajak berarti perusahaan memiliki perbedaan jumlah laba pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Adanya ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara alokasi pajak antar periode dengan kualitas laba karena perusahaan yang besar cenderung memiliki beban operasional dan pajak yang lebih tinggi. Hal ini kemudian membuat

perusahaan berusaha untuk menarik minat investor dengan memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan cara memperhatikan alokasi pajak antar periode dalam laporan keuangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : Alokasi pajak antar periode berpengaruh terhadap kualitas laba.

H_{2a} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan alokasi pajak antar periode dengan kualitas laba.

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi ROA berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dalam menghasilkan keuntungan, dan sebaliknya. Investor lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi karena potensi pembagian dividen lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki ROA yang rendah. Semakin tinggi ROA, maka respon pasar juga semakin meningkat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba [7].

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba/keuntungan dengan baik. Adanya ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dengan kualitas laba. Perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar memiliki dorongan yang kuat untuk menyajikan tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang dapat memudahkan perusahaan membeli persediaan barang untuk dijual. Banyaknya penjualan akan meningkatkan laba perusahaan yang akan membuat semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik perhatian investor untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi sehingga meningkatkan kualitas laba yang tercermin dari

peningkatan respon pasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : Profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas laba.

H_{2b} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas dengan kualitas laba.

2.4.3. Pengaruh Likuiditas terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Current Ratio* (CR). Semakin besar rasio CR, maka semakin likuid suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban lancarnya dan hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik sehingga meningkatkan kualitas laba. Namun, jika suatu perusahaan memiliki terlalu banyak aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancarnya, pihak manajemen akan dianggap tidak mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga dapat mengakibatkan respon pasar menurun saat laba diumumkan, dan berdampak pada kualitas laba perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang likuid dan mampu memenuhi kewajiban lancarnya. Adanya ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara likuiditas dengan kualitas laba karena semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin besar kebutuhan pendanaan operasional perusahaan yang berasal dari pihak eksternal. Perusahaan yang likuid menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu melunasi kewajiban lancarnya tanpa mengganggu dana operasionalnya. Hal ini akan membuat investor menaruh minat lebih pada perusahaan sehingga pada saat laba diumumkan respon yang diberikan juga akan meningkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba.

H_{2c} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan kualitas laba.

2.4.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki respon pasar yang rendah ketika laba diumumkan dibanding perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan jika suatu perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, ketika perusahaan tersebut mendapatkan laba maka pihak yang diuntungkan adalah pihak kreditor bukan investor karena keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi pembayaran hutang dan bukan untuk dividen. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi juga memiliki resiko yang besar dalam kegagalan mengembalikan pinjaman kepada kreditor dan bunga pinjaman yang besar akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan menurun. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka respon pasar akan menurun dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas laba. Kinerja yang meningkat akibat tingkat *leverage* yang rendah akan meningkatkan respon pasar sehingga akan terjadi peningkatan kualitas laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki resiko yang tinggi sehingga respon pasar akan rendah karena investor cenderung menghindari menanamkan modalnya di perusahaan yang beresiko. Adanya ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan kualitas laba karena semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat menjadi jaminan agunan dalam sumber pendanaan dan lebih mudah untuk mengakses ke pasar modal. Investor akan menaruh minat lebih pada perusahaan yang dapat mempertimbangkan penggunaan DER dengan baik, karena jika DER terlalu rendah maka pihak manajemen dianggap tidak efektif dalam mengelola dana perusahaan sementara jika DER terlalu tinggi maka investor tidak akan menaruh minat karena dapat mempengaruhi pembagian dividen. Penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : *Leverage* berpengaruh terhadap kualitas laba.

H_{2d} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *leverage* dengan kualitas laba

2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif diharapkan dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan dalam menyajikan informasi laporan keuangan. Investor akan lebih percaya dengan perusahaan yang memiliki komite audit dikarenakan laporan keuangan perusahaan yang memiliki komite audit telah melewati pengawasan yang ketat oleh tim audit. Semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin baik pengawasan terhadap informasi laporan keuangan yang menyebabkan semakin baik pula kualitas laba yang dihasilkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba [11].

Perusahaan dengan pengawasan komite audit yang baik akan menghasilkan informasi laba yang berkualitas yang meningkatkan respon pasar. Adanya ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara komite audit dengan kualitas laba. Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak tatanan yang perlu diperhatikan. Adanya komite audit yang profesional mengawasi operasional perusahaan akan memberikan keyakinan lebih kepada investor bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan baik, sehingga investor akan menaruh minat lebih terhadap perusahaan yang diikuti dengan naiknya respon terhadap laba. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba [9].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba.

H_{2e} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan komite audit dengan kualitas laba